



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 17 April 2018

Halaman: 8

Enggan Bagikan Informasi Publik

Pemdes Lembaga Terbanyak Dilaporkan ke KID DIJ

JOGJA - Pemerintah desa (Pemdes) menjadi lembaga yang paling sering dilaporkan ke Komisi Informasi DIJ (KID) terkait dengan permohonan informasi publik. Paling banyak terkait dengan kasus pertanahan dan laporan keuangan di desa.

Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi KID Suharnani Listiana mengatakan, dalam tiga tahun terakhir ini kasus sengketa informasi publik yang 78 persen terkait dengan sengketa di desa dan sisanya dari organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kasus pertanahan menjadi catatan khusus di DIJ, biasanya karena kesulitan mengakses informasi data tanah di Pemdes," ujarnya di Balai Kota Jogja kemarin (16/4).

Suharnani mencontohkan seperti laporan pada 2017 lalu di desa Trirenggo Bantul, ketika salah seorang ahli waris ingin mengetahui tentang status tanah.

Bahkan ketika pengacara sudah lima kali mendatangi Pemdes Trirenggo juga tidak dikabulkan. "Kami lakukan mediasi, karena ini kepentingan ahli waris, sekali pertemuan akhirnya bisa diberikan data yang dibutuhkan," jelasnya.

Selain pertanahan kasus sengketa informasi yang juga sering dilaporkan terkait dengan laporan keuangan. Terutama setelah adanya dana desa sejak 2014 lalu. Karena itu KID sudah membuat booklet tentang standar layanan informasi publik. "Lebih baik kalau tidak sampai sengketa," ujarnya.

Kepala KID Hazwan Iskandar Jaya menambahkan selain kasus di desa beberapa laporan maupun konsultasi yang masuk ke KID juga terkait dengan persoalan anggaran, perizinan hingga kerjasama instansi. Menurut dia, selama informasi yang diminta tidak bertentangan dengan pasal 17 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, wajib diberikan. Dalam pasal 17 disebutkan pengecualian seperti rahasia negara, urusan private atau karena persaingan tidak sehat. "Perlu diketahui juga putusan KID setara dengan pengadilan negeri, jika tidak dilaksanakan bisa dipidana," ungkapnya.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman itu mengakui sudah sekitar 10 tahun keberadaan KID masih banyak yang belum mengetahui keberadaannya. Bahkan masih banyak yang salah mengartikan KID sama dengan Komisi Penjiaran Indonesia. "Mungkin juga karena kantornya masih sama (di kantor Diskominfo DIJ), kalau diberi ruang yang lebih luas mungkin bisa lebih dikenal," ujarnya. (pra/din/11)

BEBER DATA - Ketua KID Hazwan Iskandar Jaya (kiri) dan Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi KID Suharnani Listiana

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Diskominfo	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Se
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005